LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2025

JUDUL

"Inventarisasi dan Pengawasan Digital Pelaku Usaha Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tim Ahli

Dr. I Nyoman Sudipa, ST.M.Si

Tenaga Ahli Bidang Sosial Budaya

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pariwisata tidak hanya menjadi sumber devisa negara, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Keindahan alam, kekayaan budaya, dan warisan sejarah yang dimiliki Indonesia menjadikan sektor pariwisata sebagai potensi besar untuk mengembangkan perekonomian di berbagai wilayah. Potensi ini juga berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber dalam rangka membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, evaluasi dampak ekonomi pariwisata terhadap PAD menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana sektor ini mampu mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam praktiknya, kontribusi pariwisata terhadap PAD dapat berupa pajak daerah, retribusi jasa wisata, dan pendapatan dari berbagai aktivitas ekonomi yang terkait. Misalnya, pajak hotel, restoran, dan parkir merupakan bagian dari PAD yang bersumber dari sektor pariwisata. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peluang usaha yang muncul, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan jasa transportasi lokal. Namun, tidak semua daerah mampu memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal. Perbedaan kapasitas pengelolaan, infrastruktur, dan daya tarik wisata menyebabkan disparitas hasil ekonomi yang diperoleh. Selain dampak ekonomi, aspek keberlanjutan pariwisata juga menjadi perhatian utama. Pengembangan pariwisata yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, degradasi budaya, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, evaluasi yang menyeluruh diperlukan agar

pembangunan sektor pariwisata dapat berjalan selaras dengan upaya pelestarian sumber daya alam dan budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

pada tahun 2024 penerimaan PAD (Retribusi Pariwisata) dari sektor pariwisata tercatat lebih dari Rp. 31 miliar dengan jumlah kunjungan sekitar 1,2 juta wisatawan. Tahun ini, pemerintah daerah menaikkan target menjadi Rp. 40 miliar dengan proyeksi kunjungan mencapai 2 juta wisatawan. Realisasi PHR tahun 2024 sebesar Rp 94,6 miliar lebih, meningkat 33 persen dari tahun 2023. Sekitar 900 akomodasi wisata di Klungkung, yang baru mengantongi izin hanya 10 persen. Sekitar 90 persen yang belum kantongi izin, bagaimana mereka punya kontribusi ke pariwisata di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan pariwisata di Kabupaten Klungkung masih mengalami kebocoran dari berbagai sisi. Hal pertama yang perlu dibenahi adalah kewajiban untuk memenuhi perijinan bagi para pemilik akomodasi pariwisata melalui kegiatan pembinaan atau melakukan sosialisasi secara bertahap dan mengenakan sanksi kepada pemilik akomodasi yang belum berijin untuk memperoleh ijin secara lengkap. Masih rendahnya pendapatan dari PHR adalah karena kesadaran dan kejujuran untuk membayar pajak yang masih rendah serta masih lemahnya pengawasan di lapangan. Sebenarnya cukup mudah mengawasi secara digital jumlah PHR yang harus dibayar melalui pengawasan secara digital transaksi pemesanan digital kamar hotel yang dipesan secara online.

I. Maksud dan Tujuan

1. Melakukan inventarisasi jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Klungkung

2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi penerapan ijin

3. Melakukan pengawasan secara online

4. Melakukan pengawasan lapangan dan memberikan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan.

5. Malakukan evaluasi

II. Ide dan Gagasan

Melakukan koordinasi dengan melibatkan unsur pemerintah, PHRI, Desa Dinas, Desa Adat dan Tim Yustisi sebagai penegak Perda untuk bersama-sama merumuskan tindakan dalam meningkatkan kapasitas akomodasi pariwisata untuk mengurus ijin usaha dan meningkatkan kesadaran untuk membayar PHR, serta pengenaan sanksi yang tegas.

III. Rekomendasi

Perlu segera dilakukan rapat secara berkala untuk memenuhi target yang ingin dicapai

Semarapura, 14 Oktober 2025
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-